

## **ABSTRACT**

### **Strategy and Governance of Candidate Pairs Campaign at the Election of Head of Region on Solok (Case Study on Selection of Bupati and Wakil Bupati of Solok 2015)**

**Jons Manedi**

Campaign is a process of individual or group communication activities conducted in institutional manner and aims to create a certain effect or impact. Truly, campaign of candidate can't only rely on props made by the KPU as a media campaign. Preparation of a mature campaign strategy will be more beneficial to the candidate pair in taking the public's sympathy.

The purpose of this research is to know: 1) policy implementation of KPU Regulation No. 7 year 2015; 2) strategy and governance of the candidate's campaign after the birth of the policy; 3) supporting factors and inhibiting the implementation of candidate campaign strategy; And 4) the efforts undertaken to overcome obstacles in running the campaign strategy. This research is descriptive research with qualitative approach. The informants in this study were divided into 3 (three) groups: 1) Candidate Pairing Teams; 2) Political Party Leader of the Candidate Pair; And 3) KPU of Solok. Informants in this study was 12 people, selected by purposive sampling technique.

The findings of the research indicate that the implementation of the policy of KPU Regulation Number 7 of 2015 on Campaign generally works well, because KPU Kab. Solok as the election organizer has facilitated the need of candidate campaign campaign in the form of campaign media and campaign materials. The candidate candidate's campaign strategy is to maximize face-to-face, social media, news and broadcast campaigns, and engage in effective political communication. Inhibiting factors in the implementation of candidate pair campaign strategy is, lack of funding from each candidate, the existence of black campaigns, social media that have not been well managed. Next, from the implementation of campaigns facilitated by the KPU Kabupaten Solok, the number of campaign props by candidate pair has not been adequate with the area and the number of voters in Solok District.

## **ABSTRAK**

### **Strategi dan Tata Kelola Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Solok (*Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015*)**

**Jons Manedi**

Kampanye merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Sejatinya kampanye pasangan calon tidak bisa hanya mengandalkan alat peraga yang dibuat oleh KPU sebagai media kampanye. Penyusunan strategi kampanye secara matang akan lebih menguntungkan kepada pasangan calon dalam mengambil simpati masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) implementasi kebijakan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015; 2) strategi dan tata kelola kampanye pasangan calon setelah lahirnya kebijakan; 3) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi kampanye pasangan calon; dan 4) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam menjalankan strategi kampanye. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: 1) Tim Pemenangan Pasangan Calon; 2) Pengurus Partai Politik Pengusung Pasangan Calon; dan 3) Komisioner KPU Kabupaten Solok. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 12 Orang, yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye secara umum berjalan dengan baik, karena KPU Kabupaten Solok sebagai penyelenggara pemilihan telah menfasilitasi kebutuhan kampanye pasangan calon berupa media kampanye dan bahan kampanye. Strategi kampanye pasangan calon adalah dengan memaksimalkan kampanye tata muka, media sosial, pemberitaan dan penyiaran, serta melakukan komunikasi politik yang efektif. Faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi kampanye pasangan calon adalah, kurangnya pendanaan dari masing-masing calon, adanya kampanye hitam, media sosial yang belum terkelola dengan baik. Keempat, dari sisi pelaksanaan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Solok, jumlah alat peraga kampanye menurut pasangan calon belum memadai dengan luasnya wilayah dan jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Solok.